WALIKOTA MATARAM

SAMBUTAN

Penyampaian LKjIP diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dimana di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan LKjIP tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain untuk memenuhi ketentuan diatas, penyampaian LKjIP Kota Mataram juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berikut penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pemerintah Kota Mataram; dan sebagai bahan perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan pengukuran capaian kinerja setiap tahun anggaran. Penghitungan kinerja difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator tujuan daerah. Selain itu, dilaksanakan pula identifikasi masalah yang menghambat pencapaian kinerja dan penyusunan rencana aksi perbaikan capaian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun Anggaran 2020, capaian 28 indikator kinerja utama yaitu 27 indikator kinerja sasaran strategis dan 5 indikator tujuan Kota

Mataram berada pada rata-rata kinerja sebesar **83,26 persen** dengan **kriteria tinggi.** Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Pada akhirnya, kami berharap semoga LKjIP Kota Mataram Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan bagi Pemerintah Kota Mataram untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehinggamampu mengatasi kompleksitas permasalahan pembangunan dan memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Mataram, Maret 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH.

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN 1
A. LATARBELAKANG 1
B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM 2
C. BIDANG KEWENANGAN 3
D. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 5
BABII PERENCANAAN KINERJA 11
A. PENETAPAN SASARANSTRATEGIS 11
B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 23
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 31
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 56
BAB IV PENUTUP 60

BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting di dalam organisasi. Ia merupakan alat kontrol untuk menilai kinerja setiap individu anggota organisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penilaian terhadap kinerja ini dilakukan karena akuntabilitas memegang peranan penting menjamin peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Di lingkungan pemerintahan, selain bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, penilaian dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di Indonesia, untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang berkinerja baik dan akuntabel, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan diterapkannya Sakip, instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat rencana kinerja yang disertai dengan target dan indikator yang relevan, dan melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kota Mataram, sebagai salah satu entitas pemerintahan, berkewajiban menyusun dan menyampaikan LKjIP Kota Mataramsetiap akhir tahun anggaran. Tidak hanya untuk memenuhi kewajiban tersebut, penyampaian LKjIP ini juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kota Mataram atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya; berikut penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2020; dan sebagai bahan perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan pengukuran capaian kinerja setiap tahun anggaran. Penghitungan kinerja difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran strategis dan indikator tujuan daerah. Selain itu, dilaksanakan pula identifikasi masalah yang menghambat pencapaian kinerja dan penyusunan rencana aksi perbaikan capaian kinerja.

B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM

Kota Mataram, sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki luas daratan 61,30 km^2 dan perairan laut 56,80 km^{2}serta garis pantai sepanjang 9 km. Secara geografis, Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi 116°04' dan 116°10' Bujur Timur dan 08°33' - 08°38' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan KecamatanLingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.

Secara administrasi, Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 50 kelurahan dan 325 lingkungan; dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Selaparang dengan luas 10,77 km^2 dan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,46 km^2.

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
Cakranegara	10	73	9,67	15,77
Sandubaya	7	45	10,32	16,84
Mataram	9	55	10,76	17,55
Selaparang	9	61	10,77	17,57
Ampenan	10	55	9,46	15,43
Sekarbela	5	36	10,32	16,84
Jumlah	**50**	**325**	**61,30**	**100**

Sumber: BPS Kota Mataram, 2020

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Provinsi NTB, KotaMataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok. Dengan penetapan tersebut, peran dan fungsi Kota Mataram mengalami peningkatan. Tidak hanya sebagai sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram juga berfungsi dan berperan sebagai:

1. Pusat Pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat Pemerintahan Kota Mataram;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional,serta penduduk di Provinsi NTB;

3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar(*hinterland*) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Selain itu, di dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi NTB, wilayahKota Mataram dibagi menjadi 3 (tiga) Pusat PelayananKota (PPK), yaitu pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada Kawasan Koridor AMC. Ketiga PPK tersebut meliputi:

1. Pusat Pelayanan Ampenan ditetapkan di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pendukung pariwisata;
2. Pusat Pelayanan Mataram ditetapkan di Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia dan Mataram Timur dengan fungsi sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum;

Penetapatan PPK ini bertujuan untuk melayani kegiatan eksternal wilayah secara regional dan nasional.

C. BIDANG KEWENANGAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram didasarkan pada pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diaturdidalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan tersebut meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; dan Unsur penunjang Urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri dari: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (6) Sosial. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasarmeliputi: (1) Tenaga Kerja; (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Pangan; (4) Pertanahan; (5) Lingkungan Hidup; (6)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) Perhubungan; (10) Komunikasi dan Informatika; (11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12) Penanaman Modal; (13) Kepemudaan dan Olahraga; (14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) Perpustakaan; dan (18) Kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2020, antara lain: (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pariwisata; (3) Pertanian; (4) Perdagangan; (5) Perindustrian; (6) Transmigrasi.

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Mataram membentuk perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat DaerahKota Mataram, perangkat daerah Kota Mataram terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dua puluh tiga dinas daerah, terdiri dari: Dinas Pendidikan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perdagangan; Dinas Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pariwisata; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian; Dinas Perikanan; dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5. Empat badan daerah, terdiri dari: Badan Perencanaan Pembangunan; Badan Penelitian dan Pengembangan; Badan Keuangan Daerah; dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Enam Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara, dan Kecamatan Sandubaya. Setiap kecamatan tersebut membawahi beberapa kelurahan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi camat.

Selain Perangkat Daerah di atas, dibentuk pula lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Mataram yang terdiri dari BadanKesatuan Bangsa dan

Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan Sub UrusanPemerintahan Bidang Bencana; dan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B sebagai lembaga teknis daerah yang memberikan layanan kesehatan dasar dan rujukan.

D. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Penetapan Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, serta kedudukannya sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional membawa konsekuensi pada meningkatnya tantangan pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram. Beberapa tantangan atau isu strategis yang dihadapi antara lain isu kondisifitas wilayah; isu daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat; isu daya saing ekonomi; isu infrastruktur perkotaan; dan isu pelayanan publik dan reformasibirokrasi.

Untuk mengatasi isu-isu strategis diatas, Pemerintah Kota Mataram menetapkan10 program prioritas pembangunan daerah sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan program prioritas tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Di dalam dokumen perencanaan tersebut, telah ditetapkan visi; misi; tujuan; dan sasaran pembangunan daerah yang terdiri dari 11 sasaran strategis daerahyang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan jangka menengahdan tahunan.

Tabel 1.2
Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (outcome)
1	Pemantapan Stabilitas dan Kondusifitas Kewilayahan	Masih adanya kejadian gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang tidak tertangani	Kegiatan siskamling dan penanganan aparat	Angka Kejahatan per100.000 penduduk (crime rate)

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (outcome)
		Masih terdapat kejadian konflik horizontal/antar warga horizontal/antar warga	Pemetaan potensi konflik dan optimalisasi kohesi sosial	Indeks Kota Toleran
		Rendahnya kesadaran tentang resiko perubahan iklim dan bencana	Pengembangan konsep Kelurahan Tanggap Bencana	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)
2	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Penyebaran kualitas sarana dan prasarana sekolah serta guru tenaga pendidik tidak merata	Optimalisasi implementasi sistem akreditasi sekolah	Angka Rata-rata lama sekolah
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan berkualitas	Tingkat kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih (PHBS) masihrendah	Edukasi, advokasi dan Sosialisasi PHBS dan Jaminan Kesehatan Mandiri kepada masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Rendahnya proporsi penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan		Angka Kesakitan
		Belum Optimalnya pelayanan Pelayanan kesehatan bagi Ibu dan anak	Optimalisasi implementasi SPM di semua unit fasyankes	Persentase pemenuhan indikator SPM
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan	Belum optimalnya wadah kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Memberikan dukungan terhadap pelembagaan sistim pembangunan partisipatif	Indeks Pembangunan Kepemudaan
		Kurangnya kegiatan bagi pemuda	Menyediakan sarana dan prasarana yang	Persentase Organisasi Pemuda Yang

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (outcome)
		terutama dalam menyalurkan minat dan bakat yang positif serta menstimulasi peran pemuda dalam kegiatan lingkungan/masyarakat	memadai untuk ruang kreasi kegiatan bagi anak-anak muda	Aktif
		Masih ada kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak	Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya	Penilaian Kota Layak Anak
		Belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan dalam bentuk susunan organisasi	Penguatan kelembagaan perempuan dan masyarakat dari aspek struktural dan kultural	Indeks Pembangunan Gender
5	Percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan	Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pelatihan TOT (trainingof trainer) secara berkesimabungan kepada tenaga PSKS untuk memaksimalkan penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
		Masih tingginya kesenjangan ekonomi	Meningkatkan sinergitas programprogram kemiskinan lintas sektor	Persentase Keluarga Pra Sejahtera
		Lemahnya basis data dan informasi kemiskinan yang akurat sehingga bantuan tidak	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi kemiskinan berbasis android oleh lintas sektor untuk	Persentase Hibah/Bantuan Sosial yang tepat sasaran

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (outcome)
		merata dan tidak tepat sasaran	menginterventsi program-program kemiskinan	
		Masih ada masyarakat miskin yang tidak mengakses alat kontrasepsi	Mengoptimalkan peran kader posyandu dan kader KB untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan pendampingan KIA khususnya kepada rumah tangga miskin	Total Fertility Rate (TFR)
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang	Mengoptimalkan cakupan desiminasi informasi GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Skor Pola Pangan Harapan
6	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan	Rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi local	Menyusun rencana induk pengembangan kawasan terintegrasi berbasis keungulan lokal	Persentase pertumbuhan IKM
		Perlunya kontrol yang lebih optimal terhadap harga bahan2 pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara continue /berkelanjutan	Mendorong terbangunnya kerjasama dengan daerah-daerah penyangga untuk menjamin ketersedian (supply) dan kestabilan harga bahan pokok penting dalam jangka panjang	Persentase Komoditas Strategis Yang Terinformasikan
		Kurang efektifnya pengelolaan pariwisata	Mengkolaborasikan peran akademisi, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah untuk mendisain	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (outcome)
			model pelatihan manajemen pariwisata berkelanjutan.	
		Ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan	Meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah	Persentase pertumbuhan Wira Usaha Baru
		Rendahnya daya saing UMKM terhadap ritel modern	Memfasilitasi pelaku UMKM masuk dalam rantai distribusi perusahaan ritel modern berbasis *e-commerce*	
7	Peningkatan Kualitas Keahlian Tenaga Kerja dan Iklim Berwirausaha	Angka pengangguran masih tinggi	Menyusun roadmap pengembangan potensi unggulan ekonomi kreatif daerah untuk mendorong diversifikasi lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Daya saing pencari kerja yang relatif rendah	Menyusun kebijakan bidang keternagakerjaan terintegrasi terkait dengan pelatihan, sertifikasi dan penempatan	Persentase penempatan tenaga kerja
8	Pemantapan Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan	Rendahnya nilai kelayakhunian Kota	Penguatan data dasar kebutuhan infrastruktur perkotaan	Indeks Kota Layak Huni
		Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran pemafaatan sarpras	Membangun regulasi pemanfaatan sarpras dan fasilitas umum perkotaan yang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

No	Prioritas Pembangunan Daerah (Strategik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah (Operasional)	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja (outcome)
		perkotaan dan fasilitas umum	terintegrasi	
9	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masih rendahnya kapasitas dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Individu berbasis aplikasi	Nilai AKIP
		Masih rendahnya ketersediaan data yang akurat dan update	Optimalisasi implementasi standar pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Infrastruktur dan sarana prasarana informasi publik yang disediakan pemerintah belum memadai	Edukasi, advokasi dan Sosialisasi keterbukaan informasi publik	Prosentase OPD yang sudah menerapkan *eGovernment*
10	Peningkatan Kemandirian Daerah	Masih rendahnya kemandirian daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rasio Kemandirian Daerah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN SASARANSTRATEGIS

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. AKIP diawali dengan penyusunan dan penetapan tujuan dan sasaran strategis sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Proses ini merupakan bagian integral dalam perencanaan berbasis kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk pelaksanaan pemantauan serta pengendalian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Selain dari itu, sasaran kinerja juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan program yang menyangkut keseluruhan Perangkat Daerah KotaMataram.

Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor: 155/II/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Mataram Nomor: 675/VIII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Mataram 2016-2021, sebagai hasil reviu RPJMD 2016-2021, telah ditetapkan 5 tujuan dan 11 sasaran strategis, sebagai dasar pengukuran kinerja pada Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020. **Kerangka logis** dalam penyusunan indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1: **Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.**

Misi 1 ini bertujuan untuk meningkatkan kondusifitas wilayah dengan tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal. Adapun kerangka logis ditetapkannya tujuan ini adalah kondusifitas, yang ditandai oleh rasa aman, yang terwujud dari masyarakat yang menerapkan nilai-nilai agama serta norma-norma budaya dan kearifan lokal. Capaian tujuan ini sendiri diukur dengan menggunakan indikator Indeks Keamanan Manusia (IKM). IKM menggambarkan usaha pemerintah kota mataram dalam rangka menciptakan kondisi aman bagi masyarakat Kota Mataram dengan melihat 4 (empat) dimensi yaitu mengukur usaha pemerintah dalam menjamin keamanan dari bencana; pemenuhan kesejahteraan sosial; perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan sebagai upaya mempererat kerukunan dan ketentraman di masyarakat; serta keamanan dari kekerasan baik dari ancaman kejahatan maupun penindasan golongan masyarakat atas dan mayoritas.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana.

1. Terwujudnya situasi keamanan kerukunan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif

Untuk mengukur capaian sasaran strategis daerah dalam mewujudkan kondusifitas situasi keamanan dan kerukunan di tahun 2020, digunakan 2 (dua) indikator yaitu: (1) Angka kejahatan per 100,000 penduduk *(crime rate)*, dan (2) Indeks Kota Toleran (IKT). Penurunan angka kejahatan merupakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi masyarakat yang lebih baik serta dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sedangkan IKT digunakan dengan asumsi bahwa dengan meningkatnya rasa toleransi maka dapat meningkatkan kerukunan serta menciptakan ketenteraman masyarakat di Kota Mataram.

2. Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana

Sasaran kedua dalam pencapaian tujuan dari Misi 1 di tahun 2020 diukur melalui indikator Indeks Resiko Bencana ((IRBI). Dalam komponen penilaian Indeks Keamanan Masyarakat, salah satu yang dinilai adalah dimensi kemanan dari bencana.

Misi 2: Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing

Tujuan dari Misi 2 adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial dengan indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangka mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Mataram terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif; menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Mataram terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas; dan terwujudnya peningkaan pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak.

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Dalam rangka memenuhi sasaran di atas, ditetapkan indikator sasaran untuk mengukur pencapaiannya yaitu dengan melihat angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator HLS dan RLS menggambarkan kondisi pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Pencapaian angka HLS dan RLS yang tinggi menunjukkan peningkatan akses bagi penduduk usiasekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan pada semua jenjang khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.Peningkatan status kesehatan dan gizi dalam suatu masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia dalam aspek lainnya, seperti pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, tercapainya kualitas kesehatan dan gizi yang baik tidak hanya penting untuk generasi sekarang tetapi juga bagi generasi berikutnya.

Untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas ditetapkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebagai alat ukur capaian kinerja.

AHH digunakan sebagai indikator dalam rangka menunjukan outcome dari pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat Kota Mataram. AHH yang meningkat menunjukan keberhasilan kinerja bidang kesehatan di Kota Mataram baik dari peningkatan akses masyarakat maupun perbaikan pelayanan kesehatannya.

Adapun IPKM digunakan sebagai indikator untuk melihat perkembangan status kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia. Hasil indeks tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan advokasi masalah spesifik ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk pemerintah daerah bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja program di masing-masing daerah.

3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Gender serta Perlindungan Anak

Masyarakat yang berdaya menunjukan masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Inisiatif tersebut merupakan modal dalam mewujudkan daerah yang berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Kategori Penilaian Kota Layak Huni.

IPK menunjukan kesempatan serta prestasi yang dapat ditunjang oleh perhatian pemerintah dalam mengembangkan sumber daya pemuda. Pemuda merupakan sumberdaya manusia yang potensial dalam pembangunan daerah. Bentuk perhatian kepada pemuda merupakan bentuk keperdulian terhadap pembangunan manusia di masa

yang akan datang. Adapun IKG menunjukan adanya kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender. Kesenjangan yang terjadi disebabkan adanya diskriminasi dariberbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Sedangkan Kategori Kota Layak Hunimerupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai variabel baik fisik maupun non-fisik seperti tempat ibadah, air bersih, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, ketahanan pangan, penataan PKL, dan transportasi.

Misi 3: Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi 3 memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan, peningkatan nilai tambah dan penurunan angka pengangguran dengan indikator Persentase Penduduk Miskin (*HeadCount Index*) dan Pertumbuhan Ekonomi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Mataram menetapkan sasaran strategis yaitu mendorong tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat melalui tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif. Karena pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan utama dalam menekan pengangguran, menekan angka kemiskinan, dan menekan ketimpangan yang ada.

1. Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukan oleh penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan; penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan; penurunan Persentase Keluarga Pra Sejahtera; peningkatan Indeks Komposit Ketahanan Pangan. Sedangkan keberhasilan dan strategi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ditunjukan dengan ketersediaan pangan yang merupakan komponen hidup dasar bagi masyarakat. Ketersediaan pangan di wilayah Kota Mataram dapat tetap terjaga dengan mempertahankan Indeks Komposit Ketahanan Pangan yang telah berada pada posisi aman dengan angka 3-4.

2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

Untuk memenuhi sasaran tersebut, ditetapkan indikator PDRB perkapita, Laju Inflasi dan Indeks Gini. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dengan tingkat inflasi yang terjaga serta ketimpangan antar wilayah yang rendah. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin kondisi ekonomi daerah yang sehat. Pertumbuhan ekonomi harus disumbang oleh keberlanjutan lapangan usaha yang menjadi penyumbang pertumbuhan tersebut serta

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

3. Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif

Perluasan lapangan kerja merupakan sasaran strategis yang penting untuk diperhatikan. Perluasan kerja dapat memberikan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan. Keberhasilan meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja ditunjukkan dengan capain target indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Kesempatan Kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja di Kota Mataram sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Misi 4: Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Misi 4 memiliki tujuan Meningkatnya Infrastruktur Fisik, Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja Kota Layak Huni. Kota Layak Huni adalah sebagai istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lainnya) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya).

1. Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai

Peningkatan sarana prasarana perkotaan di Kota Mataram diarahkan dalam rangka mencapai sasaran penyediaan sarana prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai dengan ditunjukan melalui pencapaian indikator indeks kota layak huni, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penyediaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik diarahan yang memiliki manfaat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, beberapa sarana prasarana diarahkan untuk mendukung upaya penurunan angka kemiskinan melalui penyediaan sarana prasarana dasar yang layak dan berkualitas.

Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik *(Good Governance)*

Misi 5 memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional, berintegrasi dan akuntabel yang ditunjukan melalui pencapaian indikator

kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dipemerintahan ditujukan sebagai langkah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dua sasaran strategis ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan layanan publik serta mewujudkan pengembangan potensi pendapatan daerah guna peningkatan layanan publik.

1. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik

Dalam upaya mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas pemerintahan dan layanan publik ditetapkan indikator kinerja yang dapat mengawal upaya pencapaian tersebut yaitu melalui pencapaian indikator pencapaian target nilai SAKIP dimana *outcome* dari pencapaian tersebut bertujuan untuk mengarahkan anggaran berbasis kinerja. Indikator lain juga diperlukan antara lain opini BPK yang dapat menunjukan akuntabilitas pertanggungjawaban atas laporan keuangan. Pencapaian target nilai unit pelayanan publik dalam rangka mengukur mengukur peningkatan kualitas pelayan publik yang secara nasional difokuskan pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perijinan terpadu satu pintu, serta pelayan RSUD. Sedangkan kinerja lainnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan capaiannya pada indeks reformasi birokrasi yang diturunkan dari indikator tujuan.

2. Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah

Kemandirian daerah merupakan prestasi yang harus dikejar oleh Pemerintah Kota Mataram dimana pada kondisi eksisting penganggaran berbagai program dan kegiatan sangat bergantung kepada Dana Pusat. Rasio Kemandirian Daerah bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta indikator keberhasilannya secara ringkas disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai			
Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	Indeks Keamanan Manusia	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan, yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk *(crime rate)*
			Indeks Kota Toleran
		Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)
Misi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEKdalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat dalam Upaya Pencapaian Kesejahteraan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Rata-rata Lama Sekolah(RLS)
		Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan	Angka Harapan Hidup (AHH)
			Indeks Pembangunan Kesehatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		kesehatan yang berkualitas	Masyarakat
		Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IKG)
			Kategori Penilaian Kota Layak Anak (KLA)
Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penaggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran.	Persentase Penduduk Miskin *(Head Count Index)*	Tercapainya Akselarasi Tingkat Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kedalaman Kemiskinan
			Indeks Keparahan Kemiskinan
			Persentase Keluarga Pra Sejahtera
			Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)
	Persentase Pertumbuhan PDRB	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan	PDRB per Kapita
			Laju Inflasi
			Indeks Gini

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		berkelanjutan	
		Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan			
Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik *(Good Governance)*			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai SAKIP
			Opini BPK
			Nilai Unit Pelayanan Publik
		Terwujudnya pengembangan	Rasio Kemandirian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		potensi pendapatan daerah	Daerah

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Seluruh tujuan dan sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2020 diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja utama Kota Mataram Tahun 2020, sebagai berikut:

Target Indikator Kinerja Utama Kota Mataram Tahun 2020

No	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	**Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal**	**Indeks Keamanan Manusia**	**4**
2	Terwujudnya situasi keamanan, dan kerukunan, yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	237
3		Indeks Kota Toleran	4
4	Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	Indeks Ratio Bencana	77
5	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat dalam upaya pencapaian**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**79,16**
6	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Harapan Lama Sekolah	15,73
7		Rata-rata Lama Sekolah	9,53
8	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	71,73
9		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0,64

No	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
10	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	65
11		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,352
12		Kategori Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	700
13	**Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran**	**Persentase Penduduk Miskin *(Head Count Index)***	**8,1**
14		**Pertumbuhan Ekonomi**	**8,27%**
15	Tercapainya Akselerasi Tingkat Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,51
16		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,32
17		Persentase Keluarga Pra Sejahtera	9,30
18		Indeks Komposit Ketahanan Pangan	3-4
19	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PDRB per Kapita (Rp.)	31.898.78
20		Laju Inflasi	3,5
21		Indeks Gini	0,334
22	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,73
23		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27
24	**Meningkatnya infrastruktur Fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas**	**Indeks Kota Layak Huni**	**65**
25	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni	65
26		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80
27		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62

No	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
28	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**BB**
29	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Nilai SAKIP	75
30		Opini BPK	WTP
31		Penilaian Unit Pelayanan Publik Kemenpan	A
32		Indeks Reformasi	BB
33	Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	30%

Sumber: *Keputusan Walikota Mataram tentang penetapan IKU Kota Mataram 2016-2021 hasil reviu*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJAPEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2020

Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* adalah akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, kinerja pemerintah dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada internal dan eksternal organisasi. Evaluasi kinerja dapat menunjukan sejauhmana instansi pemerintah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Selain itu, yang terpenting adalah evaluasi kinerja harus dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja dari setiap output yang direncanakan untuk pencapaian outcomesasaran strategis yang ingin dicapai.

Penerapan asas akuntabilitas sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Di dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Terdapat dua rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator, yaitu:

1. Indikator bermakna target peningkatan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna target penurunan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Adapun untuk skala penilaian kinerja pemerintah didasarkan pada skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja berdasarkan Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Formulir E.15 serta digunakan indikator warna sesuai kriteria sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realiasasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realiasasi Kinerja	Indikator Warna
1	≥ 91	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram dilakukan terhadap pencapaian indikator sasaran strategis yang disasar oleh program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Capaian dalam RPJMD diukur melalui indikator-indikator yang diuji melalui teknik *cascade down* dari tingkat Walikota hingga kepada eselon III sehingga penekanan pada program pembangunan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan mengatasi setiap permasalahan yang direncanakan. Pada level Perangkat Daerah, penajaman atas capaian indikator kinerja utama program diturunkan kembali menjadi kebutuhan output dari kegiatan sebagai jawaban bagi kebutuhan dalam pencapaian indikator kinerja program yang direncanakan.

Keseluruhan target dan realisasi indikator kinerjaPemerintah Kota Mataram tahun 2020 baik indikator tujuan maupun sasaran strategis sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi Pembangunan Kota Mataram disajikan sebagai berikut:

No		Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5	6
A		**Indeks Keamanan Manusia**	**3,7**	**4**	**3,7**	**92,50**
	1	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk *(crime rate)*	208	237	167	129,54
	2	Indeks Kota Toleran	4,417	4,0	4,417	87
	3	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI)	87,28	77	87,28	76,87
B		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**79,10**	**79,16**	**78,91**	**99,68**
	1	Harapan Lama Sekolah	15,58	15,73	15,59	99,11
	2	Rata-rata Lama Sekolah	9,45	9,53	9,46	99,27
	3	Angka Harapan Hidup	71,59	71,73	71,76	100,04
	4	Indeks Pembangunan kesehatan	0,63	0,64	0,653	102,03

No		Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5	6
	5	Indeks Pembangunan Kepemudaan	64,46	65	64,46	99,17
	6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,384	0,352	0,059	183,24
	7	Kategori Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	658	700	672	96,00
C	**Persentase Penduduk Miskin**		**8,92**	**8,1**	**8,47**	**94,78**
	1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,55	1,51	1,86	76,82
	2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,45	0,32	0,56	25,00
	3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	9,35	9,30	8,8	105,38
	4	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	4	3-4	4	100,00
D	**Pertumbuhan Ekonomi**		**5,58**	**8,27**	**2,39**	**28,90**
	1	PDRB Per Kapita	40.031.928	31.898.783	27.870.929	87,37
	2	Laju Inflasi	1,76	3,5	0,58	86,93
	3	Indeks Gini	0,374	0,334	0,353	94,31
	4	Tingkat Kesempatan Kerja	94,5	95,73	93,17	97,33
	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5	4,27	6,83	40,05
E	**Indeks Kota Layak Huni**		**61.6**	**65**	**61,6**	**94,77**
	1	Indeks Kota Layak Huni	61.6	65	61,6	94,77
	2	Persentase Kesesuaian Pemafaatan Ruang	80,35%	80%	80,35%	100,44
	3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	42.25	62	58,53	94,40
F	**Indeks Reformasi Birokrasi**		**B**	**BB**	**B**	**95%**
	1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	95%
	2	Nilai SAKIP	65,05	75	70	93,33
	3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
	4	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan	B	A	A	100,00

No	Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6
	5	Rasio Kemandirian Daerah	25,27	30	25,43	84,77

Pengukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar ≥91. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar ≤ 50.

Dari **5 tujuan dan 11 sasaran strategis** dengan indikator kinerja sebanyak **33 indikator kinerja**, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	KATEGORI CAPAIAN TUJUAN &SASARAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Tinggi	24 Indikator
2	Tinggi	6 Indikator
3	Sedang	0 Indikator
4	Rendah	0 Indikator
5	Sangat Rendah	3 Indikator
6	Data tidak tersedia	0 Indikator
	Jumlah	**33 Indikator**

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan rata-rata capaian kinerja per indikatornya dirinci dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja				
			≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
MISI 1: *Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai*							
A	Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	1					1

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja				
			≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
	Indeks Keamanan Manusia						92,50
1	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan yang kondusif	2				1	1
	1) Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)						*129,54*
	2) Indeks Kota Toleran					*87*	
2	Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	1				1	
	1) Indeks Resiko Bencana (IRBI)					*76,87*	
MISI 2: *Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEKdalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing*							
B	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat	2					2
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						99,68
1	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	2					2
	1) Harapan Lama Sekolah						*99,11*
	2) Rata-rata Lama Sekolah						*99,27*
2	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	2					2
	1) Angka Harapan Hidup						*100,04*

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja				
			≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
	2) Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)						*102,03*
3	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	3					3
	1) Indeks Pembangunan Kepemudaan						*99,17*
	2) Indeks Ketimpangan Gender						*183,24*
	3) Kategori Penilaian Kota Layak Anak						*96,00*
	Angka Kemiskinan						94,78
1	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat	4	1			1	2
	1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					*76,82*	
	2) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		*25,00*				
	3) Persentase Keluarga Prasejahtera						*105,38*
	4) Indeks Komposit Ketahanan Pangan						*100,00*
MISI 3 : *Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BerbasisPotensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera*							
C	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	2	1				1
	Pertumbuhan Ekonomi		28,90				
2	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	3				2	1

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja				
			≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
	dan inklusif						
	1) PDRB Per Kapita					*87,37*	
	2) Laju Inflasi					*86,93*	
	3) Indeks Gini						*94,31*
3	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	2	1				1
	1) Tingkat Kesempatan Kerja						*97,33*
	2) Tingkat Pengangguran Terbuka		*40,05*				
MISI 4 : *Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan*							
D	Meningkatnya infrastruktur publik, serta penunjang ekonomi dan sosial yang berkualitas	1					1
	Indeks Kota Layak Huni						94,77
1	Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	3					3
	1) Indeks Kota Layak Huni						*94,77*
	2) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang						*100,44*
	3) Indeks Kualitas Lingkungan						*94,40*
MISI 5 : *Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)*							

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja				
			≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
E	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	1				1	
	Indeks Reformasi Birokrasi					88,96	
1	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	4				1	3
	1) Nilai SAKIP						*93,33*
	2) Opini BPK						*100,00*
	3) Penilaian Unit Pelayanan Publik						*100,00*
	4) Indeks Reformasi Birokrasi					*88,96*	
2	Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	1				1	
	1) Persentase PAD terhadap Pendapatan					*84,77*	
		Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja				
			≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
	Jumlah Indikator Berdasarkan Kriteria Capaian	33	3		0	6	24
	Jumlah Indikator yang tidak dapat dikategorikan karena tidak tersedia data	0					

Berdasarkan capaian kinerja 33 indikator tujuan dan sasaran strategis, 30 indikator berada pada hasil kinerja sangat tinggi dan tinggi, dan 3 indikator berada pada hasil kinerja sangat rendah. Capaian realisasi kinerja tinggi dan sangat tinggi telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja yang diharapkan, sedangkan terdapat 3 indikator kinerja hasil sangat rendah yang menunjukan

capaian realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal. Jika dirata-ratakan pencapaian IKU Kota Mataram Tahun 2020 mencapai **83,26 persen** *sudah berada pada rata-rata pencapaian dengan kategori tinggi*.

Pencapaian sasaran strategis yang direncanakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai Misi Kota Mataram yang telah diperjanjikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram untuk Tahun 2020. Dalam rangka menguji apakah Misi tersebut berhasil dicapai oleh kinerja dari sasaran strategis, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan tujuan dari tiap-tiap misi. Indikator tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengukuran kinerja dari Misi Kota Mataram tiap tahunnya.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Misi 1: Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 1 bertujuan meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal dengan indikator Indeks Keamanan Manusia. Selain itu, salah satu cerminan dari perwujudanmasyarakat yang aman, rukun dan damai juga tercermin dari diterimanya Piagam Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 tanggal 14 Desember 2020 di Mataram.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
A	Indeks Keamanan Manusia	3,70	4	3,70*	92,50

Perkembangan Indeks Keamanan Manusia (IKM) secara umum membaik dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan IKM dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 capaian IKM Kota Mataram diproyeksikan masih sebesar 3,70 poin sama dengan capaian IKM Tahun 2019 yang masih dalam kategori **kinerja sedang**.

Jika dilihat dari masing-masing empat dimensi IKM yang meliputi Dimensi Keamanan dari Bencana; Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan; dan Dimensi Keamanan dari Kekerasan Fisik, Dimensi Keamanan dari Bencana mengalami sedikit penurunan skor karena terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Tahun 2020. Kesiapsiagaan masyarakat dan

pemerintah dalam menghadapi laju penyebaran Covid-19 masih kurang memadai mengingat tingkat penyebaran yang sangat tinggi, kurangnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19 pada masa awal pandemi. Permasalahan serupa dihadapi pula oleh pemerintah daerah lainnya diseluruh Indonesia. Namun demikian, kesiapsiagaan mengalami peningkatan seiring terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan Covid- 19 dan diterbitkannya beberapa aturan pencegahan penyebaran Covid- 19.

Adapun pada Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial diproyeksi terjadi penurunan skor. Hal ini disebabkan pemenuhan kesejahteraan sosial tidak berjalan seperti biasanya sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Terlihat dari sisi sosial yang dibatasi, lalu terganggunya kesehatan mental individu diatas kecemasan dan stres akan terjangkitnya virus tersebut, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan sehari-hari yang ada, ataupun bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah sesuai sasaran atau tidak. Pada saat pandemi berlangsung tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, jika terpenuhi itu pun tidak ada kemaksimalan dalam pemenuhan tersebut yang mana diketahui jika pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan sektor ekonomi, industri mengalami stagnan dalam berproduksi dan inovasi mengakibatkan kebijakan PHK besar-besaran terjadi, kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan baru pun tidak lantas semudah itu di situasi seperti ini, apalagi dari sisi sosial, di situasi pandemi ini tidak ada kontak fisik, semuanya menjaga jarak, tradisi, adat istiadat yang sudah ratusan tahun terbangun runtuh seketika mengalami perubahan, di sisi spiritual sendiri pemerintah menetapkan untuk menutup semua tempat ibadah tak terkecuali, disini sisi spiritualitas individu terganggu yang mana sudah menjadi kebiasaan melaksanakan ibadah di tempat ibadah tetapi sekarang tidak bisa melakukannya, tidak ada kesejahteraan tercipta disini, tetapi setelah pro kontra atas penutupan tempat ibadah tersebut, pemerintah, tokoh agama memberikan pengertian untuk lebih melakukan apapun itu yang memang haq (baik) untuk dilakukan.

Terkait Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan dan Dimensi Keamanan dari Kekerasan Fisik terjadi diproyeksi tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan skor.

Dalam upaya mendorong pencapaian tujuan peningkatan kondusifitas wilayah yang ditandai dengan meningkatnya rasa aman, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Angka Kejahatan per 100,000 penduduk *(crime rate)*; dan Indeks Kota Toleran.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisa	%
1	2	3	4	5	6

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisa	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk *(crime rate)*	208	237	167	129,54

Angka kejahatan per 100.000 penduduk atau *crime rate* pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, menurun sebesar 19,7% dari 208 menjadi 167 kejahatan per 100.000 penduduk. Penurunan angka kejahatan ini meningkatkan capaian realisasi kinerja pada tahun 2020, meningkat 31,61% dari 97,93% pada tahun 2019 menjadi 129,54% pada tahun 2020. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama Pemerintah Mataram dengan pemangku kepentingan lainnya, khususnya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram dan peran serta dan dukungan masyarakat. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah pada proses penciptaan situasi yang aman dengan menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Sedangkan pengendalian angka kriminalitas dilaksanakan oleh Polresta Mataram.

Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui 3 (tiga) program pokok yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anggota SatpolPP Kota Mataram sehingga terbentuk Aparat SatpolPP yang handal dan tersertifikasi untuk melaksanakan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Di dalam program ini terdapat beberapa kegiatan:
   a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
   b. Pembinaan Mental dan fisik Aparatur
   c. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, bertujuan agar tercipta situasi yang aman dan kondusif dengan melaksanakan patroli rutin ke seluruh wilayah Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pengendalian keamanan lingkungan
3. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, bertujuan untuk memberdayakan Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Peraturan Daerah, dan melaksanakan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah, serta kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus pelanggaran PERDA Kota Mataram
   b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
   c. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
2	Indeks Kota Toleran	4,417	4,0	4,417*	87,00

Adapun indikator kedua, toleransi, merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan dan inklusi sosial, serta membangun Negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasikan oleh Sila Pertama Pancasila dan UUD 1945.

Di Kota Mataram, pemeliharaan dan peningkatan nilai-nilai toleransi menjadi sangat penting. Hal ini mengingat komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama sangat rawan dengan potensi konflik jika tidak ditanamkan semangat toleransi kepada seluruh warga masyarakat.

Terkait dengan toleransi, SETARA *Institute for Democracy and Peace* pada tahun 2020 belum mempublikasikan hasil kajian dan indexing terhadap Kota Mataram dalam hal isu promosi dan praktik toleransi. Namun demikian, diproyeksikan Indeks Toleransi Kota Mataram masih sama dengan tahun 2019 sebesar 4,417 dengan mempertimbangkan ketiadaan kasus gesekan yang berhubungan dengan toleransi.

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan toleransi dan pelaksanaan HAM tidak terlepas dari pelaksanaan 3 program pokok oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram yang meliputi:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan dan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
   b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
   c. Peningkatan ideology dan ketahanan bangsa
   d. Penerimaan dan penyerahan kirab pataka
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berbudaya dalam forum pengkajian masalah strategis dan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mental dan moralitas remaja dan tenaga kerja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial politik
   b. Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Lembaga-lembaga Non Pemerintah

Selain program pokok di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram sebagai *leading organization* dalam mengupayakan kondusifitas di wilayah Kota

Mataram bekerja sama Kecamatan dan lembaga vertikal lain juga mengoptimalkan penanganan konflik melalui beberapa hal,yaitu:

a. Meningkatkan Supremasi hukum secara tegas oleh Aparat Keamanan dan Pemerintah Kota Mataram (dinas/instansi yang terkait);
b. Memberikan sanksi/hukuman bagi yang melanggar kesepakatan bersama/perjanjian perdamaian yang telah ditandatangai oleh kedua belah pihak yang bertikai.
c. Mengintesifkan hubungan silatuhrahmi antar lingkungan-lingkungan yang berkonflik dengan pertemuan terbuka seperti pengajian umum bersama, sosialisasi tentang pentingnya harmonisasi kehidupan sosial bermasyarakat

2. Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat

Keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat diukur dengan indikator Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Semakin rendah angka IRBI, menandai semakin menurun resiko bencana yang kemungkinan terjadi di suatu daerah.

Kota Mataram, sebagai salah satu kota di Provinsi NTB, termasuk kota dalam kelas resiko tinggi sehingga membutuhkan pencegahan dan penanganan bencana yang baik. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, 8 jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram, diantaranya banjir/genangan air, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim & abrasi pantai, angin kencang/puting beliung, kebakaran, epidemi/wabah penyakit dan konflik sosial.Potensi bencana ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, tofografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya.

Menyadari potensi bencana yang kemungkinan terjadi di wilayah Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram terus berupaya meningkatkan kualitas pencegahan dan penangangan bencana. Nilai IRBI Kota Mataram tahun 2020 masih menggunakan hasil perhitungan tahun 2019 dikarenakan belum dilakukan perhitungan kembali oleh BNPB. IRBI Kota Mataram tahun 2020 diproyeksikan masih berada pada angka 87,28 yaitu termasuk tingkat resiko sedang. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, nilai IRBI Kota Mataram mengalami penurunan yang cukup signifikan yang menunjukkan berkurangnya tingkat resiko dari resiko tinggi menjadi sedang. Penurunan nilai IRBI ini dimungkinkan dengan meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI)	87,28	77	87,28	**76,87**

Terkait dengan kinerja pencegahan dan penanganan bencana kebakaran, kualitas pencegahan dan penanganan bencana kebakaran mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pemeliharaan dan mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung kinerja petugas pemadam kebakaran, penambahan sarana

dan prasarana serta dukungan perbaikan tingkat pendidikan melalui pelaksanaan latihan mandiri untuk meningkatkan kualifikasi personel. Selain itu, peningkatan kinerja ini juga didukung oleh meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana kebakaran dengan melakukan himbauan dengan cara membagikan/memberikan semacam brosur atau pamflet yang berisi himbauan akan bahaya bencana kebakaran dan cara mengantisipasi ketika terjadi bencana kebakaran.

Namun demikian, meskipun kualitas pencegahan, penanganan dan pelayanan pasca bencana alam dan bencana kebakaran oleh BPBD dan dan Dinas Pemadam Kebakaran mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa komponen yang perlu ditingkatkan baik untuk menjaga dan meningkatkan kinerja kedua institusi. Beberapa langkah strategis ditempuh Pemerintah Kota Mataram untuk kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu:

1. Penambahan jumlah personil ASN yang proporsional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
2. Pengadaan sarana/prasarana perkantoran dan operasional lapangan;
3. Peningkatan persediaan logistik dan bahan/material untuk keperluan tanggap darurat dan penanganan pasca bencana;
4. Pembinaan terhadap personil melalui Diklat Teknis Penanggulangan Bencana bagi Aparatur/TRC dan Relawan;
5. Bimtek/Koordinasi Perencanaan dan Peningkatan Waskat disetiap unit kerja;
6. Meningkatkan kemampuan aparatur/relawan dalam penanganan bencana;
7. Meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan BPBD dalam penanganan pra bencana tanggap darurat maupun pasca bencana;
8. Meningkatkan keterpaduan para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
10. Meningkatkan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran kepada aparatur Dinas Pemadam Kebakaran sehingga terbentuk aparatur berkualitas dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
11. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman/kesadaran dan kesiapsiagaanmasyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap potensi dan kejadian bencana kebakaran; dan
12. Meningkatkanpelatihan penanganan bahaya kebakaran pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan strategi diatas dilakukan dengan menjalankan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemulihan Pasca Bencana Alam yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan penduduk yang terdampak bencana dan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana.
   b. Peningkatan dan rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.

2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik penanggulangan bencana dan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
   b. Fasiltasi Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencanan.
   c. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
   d. Pemberdayaan masyarakat pengurangan risiko bencana.
3. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk penyiapan logistik dalam penanggulangan bencana dan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana.
   b. Pengadaan Logistik dan Obat-obatan.
   c. Penyusunan prosedur penanggulangan bencana.
   d. Simulasi bencaana Sosial.
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanganan Kebakaran yang bertujuan untuk mewujudkan penanganan terhadap kesiagaan kebakaran dan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Pendidikaan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.
   b. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan SDM bagi aparat terhadap pencegahan dan kesiagaan kebakaran dan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
   b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

Misi2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEKdalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing

Misi 2 bertujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencapaian Kesejahteraan Sosial. Untuk mengukur keberhasilan pemenuhan tujuan tersebut ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
A	Indeks Pembangunan Manusia	79,10	79,16	78,91	99,68

Laju pertumbuhan IPM Kota Mataram dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren positif. IPM Kota Mataram terus mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 76,37 di tahun 2015 menjadi 79,10 di tahun 2019. Namun IPM Kota Mataram kembali mengalami penurunan di tahun 2020; menurun 0,19 poin dari sebelumnya sebesar 79,10 di tahun 2019 menjadi 78,91 di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dari ketiga aspek utama dalam perhitungan IPM, dimensi standar hidup layak dengan komponen Pengeluaran Per Kapita mengalami penurunan secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Pengeluaran Per Kapita turun dari 15,43 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 14,97 juta rupiah atau pertumbuhannya melambat sebesar minus 2.97% pada tahun 2020. Menurunnya rata-rata pengeluaran per kapita tercermin dari rendahnya angka inflasi yaitu sebesar 0.58%. Sejak merebaknya pandemi covid-19, Kota Mataram cendrung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0.33%) sampai dengan bulan September 2020 (minus 0.04%), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat dari kelas pekerja dan bekerja disektor informal, masyarakat rentan miskin, dan masyarakat miskin. Untuk mengatasi penurunan daya belitersebut, Pemerintah Kota Mataram dibantu oleh Pemerintah Pusat memberikan bantuan sosial melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Meskipun IPM Kota Mataram mengalami penurunan, IPM Kota Mataram masih yang tertinggi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan masuk dalam kategori tinggi; dan Pemerintah Kota Mataram tetap berupaya menjaga pertumbuhan IPM agar tetap pada kategori tinggi. Peningkatan IPM tidak terlepas dari 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran strategis tersebut yaitu: (1) Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif; (2) Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas; dan (3) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak.

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Harapan Lama Sekolah	15,58	15,73	15,59	99,11
2	Rata-rata Lama Sekolah	9,45	9,53	9,46	99,27

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kota Mataram pada periode RPJMD Kota Mataram 2016-2021 utamanya diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, tata kelola pendidikan dan infrastruktur pendidikan melalui penguatan atau pemantapan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada aspek akses pendidikan, Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB tidak mengalami kendala dalam penyediaan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengingat kondisi geografis yang mudah dilalui.

Adapun aspek tata kelola pendidikan mengalami perkembangan yang relatif cukup baik. Hal ini tercermin dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami peningkatan. HLS pada tahun 2020 sebesar 15,58 tahun; meningkat

0,05 tahun dibandingkan dengan HLS tahun 2019. Namun demikian, capaian ini belum mampu memenuhi target HLS 2020 sebesar 15,73 tahun. Demikian halnya dengan RLS. RLS pada tahun 2020 sebesar 9,45 tahun; meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan RLS tahun 2019. Namun, sama halnya dengan HLS, capaian RLS 2020 belum mampu mencapai target RLS 2020 sebesar 9,53 tahun.

Untuk terus mendorong peningkatan capaian sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, Dinas Pendidikan Kota Mataram melaksanakan beberapa program pokok sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan memperoleh pendidikan setidak-tidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat. Pendidikan dasar sembilan tahun dapat ditempuh melalui jalur formal pada satuan pendidkan SD/MI, SMP/MTs, maupun nonformal pada Kejar PAKET A dan PAKET B.
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan melalui uji kompetensi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang Pendidikan Dasar, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang PAUD , dan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang Tenaga Kebudayaan.
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan mekanisme evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan melalui Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penyusunan Profil Pendidikan, Pengembangan Sistem Informasi melalui WEB, dan Pelaksanaan Kerjasama dengan Media Massa dan Elektronika tentang Informasi Berbagai Isu Pendidikan.
4. Program Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan agar semua anak usia 0-6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia. PAUD merupakan pendidikan persiapan untuk melanjutkan pendidikan di SD/MI. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan *(the quality of intakes)* yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar melalui Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). PAUD dilaksanakan melalui jalur formal di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
5. Program Pendidikan Non Formalbertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk

melanjutkan ke pendidikan formal secara terbuka, peran serta aktif dari lembaga masyarakat untuk membantu warga masyarakat sangat mendukung program penuntasan buta aksara, dengan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, Pengembangan data dan informasi pendidikan non , Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK) , Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK) , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK).

Selain kelima aspek kebijakan pendidikan diatas, ditetapkan pula kebijakan pendukung lainnya yang difokuskan kepada pengembangan potensi Pendidikan Kesenian Tradisional. Jumlah sanggar seni 203 tersebar di seluruh kecamatan. Sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya. Disamping pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional, pemerintah juga berupaya menjaga kelestarian Bangunan Cagar Budaya (BCB). Namun hal ini menemui kendala dimana bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan dan pemugaran ulang.

Langkah strategis lainnya yang diambil untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusifadalah dengan meningkatkan peran perpustakaan sebagai salah satu pusat belajar mandiri. Sebagai Pusat dan Referensi Pendidikan di Provinsi NTB, Kota Mataram harus menunjang layanan publiknya dibidang perpustakaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas Pendidikan di Kota Mataram. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan yang diimplementasikan melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, kinerja perpustakaan dan arsip bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, dan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.

2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas

Keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini diukur dengan indikator dan target capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisas	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka Harapan Hidup	71,59	71,73	71,76	100,04
2	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0,63	0,64	0,65	102,03

Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 AHH masyarakat Kota Mataram mencapai angka 71,76 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan dengan AHH tahun 2019 yang mencapai angka 71,59 tahun dan melampaui target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 71,73. Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas ini, salah satunya, di dukung oleh meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas terhadap setiap warga yang disediakan oleh seluruh puskesmas. Keseluruhan Puskesmas di Kota Mataram telah memiliki pelayanan yang sudah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya Sertifikat Penghargaan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 sebagai Kota yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi. Salah satu perbaikan layanan yang dilakukan puskesmas adalah penggunaan sistem nomor antrian pada fasilitas ruang tunggu, ditambah dengan penerapan pelayanan sesuai dengan SOP menjadikan layanan yang semakin ramah dan tidak berbelit.

Faktor lain yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Di Kota Mataram tersedia fasilitas kesehatan yang cukup memadai seperti Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, Puskesmas dan Jaringannya. Selain itu juga, ketersedian sumber daya kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan jenis tenaga kesehatan lainnya merupakan tulang punggung (backbone) dalam mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan di Kota Mataram. Tidak hanya ketersediaan akses layanan kesehatan yang memadai, tetapi keterjangkauan pelayanan kesehatan di Kota Mataram juga telah memberikan dampak positif bagi optimalnya penanganan masalah kesehatan masyarakat.

Sedangkan untuk capaian indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kota Mataram melampaui target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu di angka 0,64. Mengalami peningkatan 0,02 dari angka 0,63 di tahun 2019 menjadi 0,65 di tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan adanya penguatan program gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui optimalisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial dalam masa pandemi Covid-19 sehingga capaian target Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dan Mortality Death Rate (MDR) di bidang kesehatan dapat ditingkatkan, serta diharapkan ke depannya tidak ada lagi warga masyarakat yang terpapar penyakit atau virus yang dapat membahayakan hidupnya. Selain itu, pentingnya peningkatan layanan, pengawasan dan memberikan dukungan terhadap penanganan kasus Covid-19, dan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang selalu muncul dan menjadi masalah setiap tahunnya.

3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak

Keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak diukur dengan indikator dan target sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	64,46	65	64,46*	99,17
2	Indeks Ketimpangan Gender	0,384	0,352	0,059	183,24
3	Kategori Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	658	700	672	96,00

Capaian Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) tahun 2020 diproyeksikan hampir sama dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 64,46. Capaian ini belum mampu mencapai target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 65. Hal ini tidak terlepas dari akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada realokasi anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan kepada anggaran penanganan Covid-19. Adapun beberapa program dan kegiatan yang mengalami refocusing anggaran antara lain Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda pada kegiatan Pendataan potensi pemuda dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda; Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan pada kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan; dan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda.

Indikator kedua untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Tingkat ketimpangan gender di Kota Mataram pada tahun 2020 diproyeksi mengalami perbaikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, menurun dari 0,384 pada tahun 2019 menjadi 0,059 pada tahun 2020. Dengan angka ini, ketimpangan di Kota Mataram termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang. Menurunnya ketimpangan gender menandai meningkatnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan perannya dan mengikutsertakan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan.

Disamping penguatan peran perempuan melalui peningkatan kesetaraan gender, Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak secara kontinyu dengan berpedoman pada Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan Perwal Kota Mataram Nomor 33 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota layak Anak di Kota mataram. Perlindungan terhadap anak dan penyelenggaraan

kota layak anak diwujudkan dengan memberikan akses dan ruang ekpresi serta media kreativitas anak. Keberadaan Taman-taman Kota yang juga menjadi Kawasan Hijau Kota, dijadikan sebagai salah satu ruang apresiasi dan media ekspresi anak. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembentukan forum anak kelurahan se-Kota Mataram sebagai wahana anak meyalurkan kreativitasnya di masing-masing kelurahan se-Kota Mataram.

Adapun capaian indikator Kategori Penilaian Kota Layak Anak (KLA) mengalami peningkatan dari angka 658 pada tahun 2019 menjadi 672 pada tahun 2020. Pencapaian ini belum melampau target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 700. Dengan pencapaian ini Kota Mataram masih berada pada kategori Madya. Kategori madya menunjukkan bahwa Kota Mataram telah memenuhi 5 (lima) cluster penilaian KLA. Namun pemenuhan 5 cluster tersebut optimal. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya belum tersusun satu produk hukum yang mengatur tentang KLA. Produk hukum yang ada saat ini masing sektoral. Selain itu, gugus tugas KLA belum berkontribusi secara optimal terhadap pemenuhan indikator KLA; Rencana Aksi Daerah KLA belum terintegrasi dengan RPJMD; dan fasilitas umum dan tempat berkumpul anak masih belum bebas dari asap dan iklan rokok.

Untuk mengatasi hal tersebut, disusun rencana aksi, yaitu:

1. Melaksanakan integrasi peraturan KLA ke dalam 1 Perda yang memuat 5 cluster KLA dan penguatan kelembagaan;
2. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan RAD KLA;
3. Mengoptimalkan kinerja gugus tugas melalui koordinasi dan manajemen data; dan
4. Merelokasi iklan rokok jauh dari lokasi ruang bermain anak, sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, dan perkantoran.

Keberhasilan capaian kinerja penurunan ketimpangan gender dan penyelenggaraan KLA di atas tidak terlepas dari pelaksanaan 4 program pokok oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram yang meliputi:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan :
   - Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
   - Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan:
   - Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
   - Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
   - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
   - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
   - Rakor Pokja PUG dan PA
   - Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
   - Forum Anak/Konggres Anak/Hari Anak nasional
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, bertujuan menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan :
   - Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
   - Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan
   - Monev dan pelaporan
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuanPembinaan organisasi perempuan

Misi 3: Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi 3 memiliki tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran dengan indikator Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index*) dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, dimana terhadap pencapaian indikator persentase penduduk miskin sebanyak 1 sasaran strategis dan terhadap pencapaian indikator tujuan persentase pertumbuhan ekonomi sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index*)	8,92	8,10	8,47	94,78
2	Pertumbuhan Ekonomi	4,98	8,27	2,39	28,90

Selanjutnya penjabaran dalam rangka terhadap pencapaian indikator Persentase Penduduk Miskin *(Head Count Index)* yaitu dengan sasaran strategis:

1. Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat

Dalam tujuan misi kedua yaitu penurunan angka kemiskinan, Kota Mataram terus memperlihatkan kinerja yang positif. Angka Kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan tren penurunan yang cukup progresif dari angka 8,92% pada tahun 2019, turun 0,45% menjadi 8,47% pada tahun 2020. Meskipun belum melampaui target yang telah

ditetapkan sebesar 8,1%, angka kemiskinan ini masih jauh di bawah angka kemiskinan di Provinsi NTB yang sebesar 13,97 persen. Apabila diamati data tersebut memang belum terlihat dampak pandemi covid-19 terhadap angka kemiskinan di Kota Mataram mengingat rilis data kemiskinan terutama pada level kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan hasil survey pada bulan Maret tahun 2020, sementara covid-19 terjadi sekitar bulan April tahun 2020. Sehubungan dengan itu, penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan dan program induksi kemiskinan pada tahun 2019.

Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif serta untuk mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram telah dirumuskan empat strategi utama yaitu: (1) Memperbaiki program perlindungan sosial; (2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (4) Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di tahun 2020 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,55	1,51	1,86	76,82
2	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,45	0,32	0,56	25,00
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	9,35	9,30	8,80	105,38
4	Indeks Komposit Ketahanan	4	3-4	4	100

Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 tidak diiringi oleh penurunan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman kemiskinan menunjukkan kenaikan dari 1.55 pada tahun 2019 menjadi 1.86 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan (GK). Demikian juga Indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0.45 pada tahun 2019 menjadi 0.56 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pengeluaran yang semakin lebar antar sesama penduduk miskin. Peningkatan nilai pada kedua indeks ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor belum efektif dan tepat sasaran karena intervensi belum sepenuhnya mengacu pada data tunggal (single data) yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, DTKS sebagai acuan intervensi program penanggulangan kemiskinan belum optimal dilakukan pemutakhiran (updating) yang disebabkan oleh lambannya proses pelaksanaan musyarawah kelurahan (muskel).

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan telah diupayakan serangkaian kegiatan yang lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin pada tahun 2020 yaitu:

1. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan sebanyak 30 orang, jumlah keluhan keluarga miskin yang teregistrasi dan tidak teregistrasi dalam BDT yang terlayani sebanyak 2511 orang, PRSE sebanyak 30 orang, jumlah PMKS Lansia yang mendapatan bimbingan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 2.682 orang, jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan sebanyak 25 orang, dan jumlah penyandang disabilitas dan korban NAPZA yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan sebanyak 182 orang.
2. Jumlah KUBe jasa e-Warong yang dilakukan pembinaan sebanyak 27 KUBe (270 orang).
3. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan BPNT sebanyak 33.561 KK dan KPM PKH sebanyak 15.505 KK.

Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan melalui delapan program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, bertujuan meningkatkan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu 1). Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin; 2). Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT); 3). Pemantapan dan Pendampingan e-Warong KUBe Jasa; 4). Pemantauan Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan rehabilitasi sosial ekonomi di masyarakat khususnya PMKS, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu : 1). Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2). Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; dan 3). Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
3. Program pembinaan anak terlantar, bertujuan membinaperilaku dan meningkatkan kualitas serta keterampilan anak terlantar guna peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui kegiatan yaitu 1). Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar; dan 2). Penanganan Anak Jalanan (ANJAL).
4. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, bertujuan melaksanakan bimbingan sosial bagi PMKS Lansia yang dilaksanakan melaluiBimbingan Sosial bagi PMKS Lansia.
5. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, eks PSK/WTS, eks narkoba dan penyakit sosial lainnya), bertujuan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi ODHA, pemulung, eks narkoba,eks wanita tuna susila dan eks narapidana yang dilaksanakan melaluiPendidikan dan

pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosialdan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial, yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan bagi satuan linmas, yang dilaksanakan melaluiPelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas.
8. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu 1). Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH); 2). Peningkatan Program keserasian Sosial; 3). Penguatan Nilai Nilai Kepahlawanan; 4). Peningkatan Program Asuransi Kesejateraan Sosial (ASKESOS); dan 5) Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR).
9. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika.

Adapun presentase Keluarga Pra Sejahtera di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, dari 9,35 pada tahun 2019 menjadi 8,80 pada tahun 2020. Penurunan persentase keluarga pra sejahtera merupakan indikator yang juga berperan dalam mencapai sasaran strategis ini. Kinerja dari indikator tersebut sangat ditunjang oleh peranan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Upaya penurunan persentase keluarga pra sejahtera mencapai kinerja 105,58 persen dari target di tahun 2020 dan meningkat sebesar 4 persen dibanding tahun 2019.

Program-program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja diatas yaitu:

1. Program Keluarga Berencana, bertujuan memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana & kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka Kematian Ibu,bayi & Anak serta penanggulangan masalah reproduksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, Lomba Institusi Masyarakat, Pembinaan Keluarga Berencana (DAK), Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik).
2. ProgramPengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR yangbertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas generasi mendatangyang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.
3. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan kegiatan : Sarana Bahan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Sarana Bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (DAK)

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan dengan kegiatan Peran serta kepala lingkungan, RT dan LSOM dalam program PPKB. Orientasi kelompok UPPKS bagi pengurus/kader kelompok UPPKS.
5. Program Advokasi dan Penggerakan dengan kegiatan antara lain Sosialisasi keebijakan pengendalian penduduk dan KB, Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan, Rakornis, Pertemuan Fapsedu Tk. Kota, Pertemuan Koalisi Kependudukan
6. Program Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB/PKB dan kader KB antara lain : Peningkatan kapasitas kader, dan Pertemuan kader.

Sedangkan Indeks Komposit Ketahanan Pangan menunjukkan konsistensi capaian sesuai dengan target pengendalian dan tercapai sebesar 4 poin di tahun 2020. Indeks komposit ketahanan pangan harus diupayakan untuk ada pada skor ideal yaitu 3 sampai 4. Tahun 2020, indeks komposit ketahanan pangan kota Mataram mendapat skor 4 yang secara teknis skor 3 s.d 4 masuk dalam kategori “aman”.

Ketahanan Pangan dalam perspektif Kota Mataram sangat erat hubungannya dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat karena ketersediaan pangan merupakan komponen dasar bagi kehidupan 8,47 persen masyarakat Kota Mataram yang berkategori miskin. Kelangkaan Pangan dapat meningkatkan harga kebutuhan tersebut sehingga beban mereka akan meningkat dan mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Strategi dalam ketersediaan pangan diupayakan dalam beberapa langkah yaitu mendrive makanan pokok masyarakat serealia ke arah bahan makanan lain sehingga ketergantungan akan ketersediaan bahan pokok serealia akan berkurang dan ketersediaanya menjadi tercukupi untuk golongan masyarakat kurang mampu. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram, berkontribusi positif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat.

Selain itu, ditingkatkan pula kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk tanaman strategis yang dapat mengurangi lonjakan harga pada komoditas tersebut yang sering disebabkan karena kekurangan produksi diantaranya adalah komoditas cabe serta sayuran.

Selain strategi diatas, dalam rangka menunjang ketahanan pangan juga harus dapat menjamin bahwa komoditas pangan sebagai komponen dasar masyarakat di Kota Mataram aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pemantauan berkoordinasi dengan BPPOM serta disosialisasikan dan diumumkan bahwa 100 persen komoditas pangan di Kota Mataram Tahun 2020 aman untuk dikonsumsi. Rasa aman terhadap kebutuhan pangan masyarakat dapat menjaga stabilitas harga komoditas pangan serta produksi komoditas tersebut.

Dalam rangka pencapaian indikator tujuan kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kinerja perekonomian Kota Mataram. Kinerja ekonomi rata-rata tumbuh sebesar 7- 8% per tahun selama kurun

waktu 4 tahun terakhir. Namun Pascagempa Lombok pada tahun 2018, kinerja ekonomi Kota Mataram berada pada angka 4,95%. Kondisi ekonomi Kota Mataram setahun pasca Gempa kembali menunjukan kinerja yang sangat baik dengan pertumbuhan mencapai 5,58 persen persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar minus 5,50% dibandingkan tahun 2019. Kondisi tersebut disebabkan adanya pandemi global Covid-19 yang membuat perekonomian global, nasional, dan regional tertekan. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar minus 34,12%. Kemudian disusul oleh kategori akomodasi dan makan minum sebesar minus 32,09% dan konstruksi sebesar minus 22,30%.

Kinerja Perekonomian Kota Mataram dengan penurunan pertumbuhan, dari tumbuh sebesar 4,98 persen di Tahun 2019 menjadi hanya peningkatannya sebesar 2,39 persen di Tahun 2020 yang menciptakan sebesar Rp. 18,68 Triliun. Namun yang patut disukuri adalah masih pergerakan ekonomi di masa pandemi Covid-19 melanda Kota Mataram. Ada lima (5) Kategori Usaha Penyumbang PDRB ADHK Kota Mataram Tahun 2020 terbesar yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,50%);
2. Konstruksi (8,80%);
3. Jasa Keuangan & Asuransi (12,10%);
4. Industri Pengolahan (9,10%);
5. Jasa Pendidikan (9,21%).

Dalam rangka menjamin pertumbuhan ekonomi, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2020 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	PDRB Per Kapita	28.384.352	31.898.383	27.870.929	87,37
2	Laju Inflasi	1,76	3,50	0,57	87,21
3	Indeks Gini	0,374	0,334	0,353	94,31

Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan tidak dapat dipisahkan dalam memperlihatkan indikasi pembangunan ekonomi suatu daerah, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat menjamin seluruh masyarakat akan tambah sejahtera serta kemiskinan berkurang di suatu daerah. Indikator lain perlu dimunculkan sebagai pembanding dari kualitas pertumbuhan ekonomi agar arah pembangunan yang merata dapat terlihat.

PDRB Per kapita ADHB Kota Mataram sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 terus meningkat. Pada tahun 2016, PDRB perkapita Kota Mataram tercatat sebesar Rp. 32,22 juta. Secara nominal terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp. 40,03 juta. Namun pada tahun 2020, besaran PDRB Per Kapita sedikit menurun yaitu

sebesar Rp. 37,69 juta. Angka PDRB Per Kapita masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Kenaikan PDRB Per Kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB Per Kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2019, PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dari Rp. 25,11 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 28,38 juta tahun 2019. Namun pada tahun 2020 sedikit menurun hingga sebesar Rp. 27,87 juta.

Laju inflasi di Kota Mataram tahun 2020 sebesar 0,57 persen, jauh lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu pengendalian pada kisaran 3,5 persen sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah. Capaian kinerja tersebut tercatat sebesar 87,21 persen dibandingkan target.

Pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu program strategis baik di Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Tidak heran, karena inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi kesuksesan suatu daerah dalam pembangunan. Dampaknyapun akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyatakat karena harga komoditas yang stabil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketersediaan pasokan bahan pangan akan menjamin ketahanan pangan suatu daerah. Dengan arahan pusat, dibentuk Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) dalam menjaga target inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Stok; Kelancaran Distribusi; Keterjangakuan Harga; dan Komunikasi Kebijakan) mejadi kata kunci dalam keberhasilan pencapaian target pengedalian inflasi Kota Mataram. Dengan inflasi yang terkendali akan mendukung pada minat investasi swasta di Kota Mataram yang akan membawa multiplayer effect terhadap perekonomian kota mataram terutama pada kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Pengendalian inflasi juga sangat berpengaruh pada masyarakat miskin yang sangat sensitif pada perubahan harga terutama untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.

3. Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2020 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisas	%
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kesempatan Kerja	94,49	95,73	93,17	97,33
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,50	4,27	6,83	40,05

Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mencapai target kinerja di tahun 2020 seperti yang diharapkan dikarenakan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) terus mengalami penurunan dari 7.50% pada tahun 2015 menjadi sebesar 5.35% pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, TPT Kota Mataram mengalami peningkatan, berada pada angka 6.72% pada September 2018 pasca bencana gempa bumi, yang berpengaruh langsung terhadap seluruh sektor di Kota Mataram terutama pada sektor Pariwisata. Pada tahun 2019, TPT Kota Mataram kembali mengalami penurunan menjadi 5,5 persen, turun sebesar 1,22 persen dibandingkan tahun 2018 yang menunjukan perkembangan yang baik dari penyerapan tenaga kerja selama tahun 2019.

Namun demikian, pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, TPT Kota Mataram kembali mengalami peningkatan sebesar 1,33% dari sebesar 5,5% pada tahun 2019 menjadi 6,83% pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya aktivitas yang mulai berkurang, terutama sektor perdagangan, transportasi karena ada pembatasan orang keluar rumah. Selain itu, sektor-sektor produksi yang menghasilkan barang juga mengalami penurunan produksi karena menurunnya permintaan pada saat pandemi Covid-19 yang masuk NTB mulai Maret 2020, sehingga banyak sektor industri pengolahan yang terkena dampak. Demikian halnya dengan sektor pariwisata yang berhenti beraktivitas pada bulan April, Mei dan Juni.

Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

1. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana publik dan penunjang perekonomian yang memadai

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2020 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kota Layak Huni	61,6	65	61,6	94,77
2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,35%	80%	80,35%	100,44%
3	Indeks Kualitas Lingkungan	45,25	62	58,53	94,40

Indeks Kota Layak Huni (IKLH) merupakan nilai indeks kelayakhunian kota berbasis persepsi masyarakat, yang dilakukan dengan melakukan survei terkait ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lain-lain), ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lain-lain), ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas, kemananan dan keselamatan,

kualitas lingkungan, dukungan fungsi ekonomi, sosial dan budaya kota, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Indeks Kota Layak Huni (Most Livable City Index – MLCI) dihitung oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia dalam periode 3 tahun sekali. Perhitungan Indeks Kota Layak Huni pada tahun 2017 dikategorikan menjadi 3 kelompok, yakni top tier city (kota dengan indeks livability di atas rata-rata), average tier city (kota dengan nilai indeks livability rata-rata), dan bottom tier city (kota dengan nilai indeks livability di bawah rata-rata). Berdasarkan MLCI tahun 2017, Kota Mataram memperoleh skor 61,6 sehingga berada pada kategori Bottom Tier City. Hasil perhitungan MLCI periode tahun 2020 belum tersedia sehingga capaian Indeks Kota Layak Huni Kota Mataram tahun 2020 diproyeksikan masih sama dengan hasil perhitungan tahun 2017. Meskipun data capaian kinerja tidak ada dalam menggambarkan kinerja daerah, namun upaya pemenuhan 7 (tujuh) indikator IKLH tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Sama halnya dengan capaian IKLH, capaian kinerja yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang pada tahun 2020, yang dilihat dari persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, diproyeksikan masih sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 80,35 persen. Adapun pengembangan sarana prasarana kota yang sedang direncanakan dalam rangka menunjang fungsi dan peran Kota Mataram yaitu:

1. Rencana pembangunan prasarana transportasi berupa Terminal tipe C;
2. Rencana pengembangan sistem transportasi laut yang terdiri dari pelabuhan wisata dan rute penyebrangan wisata;
3. Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagakelistrikan yang terdiri dari pengembangan PLTMH, PLTGTL, dan PLTS;
4. Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah berupa rencana pengembangan IPAL Komunal.

Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Keberhasilan pencapaian Misi 5 diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB menunjukkan sejauh mana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. IRB Kota Mataram membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 IRB mencapai 58,88 dengan kategori CC. Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 61,23 dengan kategori B. Namun, pada tahun 2018, dikarenakan bencana gempa bumi, penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Unit Pelayanan Publik di Kota Mataram serta Kabupaten se Pulau Lombok untuk Tahun 2018 ditiadakan oleh Kementerian PAN RB, mengingat konsentrasi pemerintah daerah di Pulau Lombok pada upaya pemulihan pasca bencana Gempa Lombok pada Agustus 2018 lalu. Pada tahun 2019 kembali dilaksanakan penilaian capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kota Mataram dan

ditetapkan capaian IRB sebesar 62,27. Adapun untuk tahun 2020, capaian IRB Kota Mataram diproyeksikan masih sama dengan capaian IRB tahun 2019 yaitu sebesar 62,27 yang termasuk dalam kategori B.

1. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis di atas, digunakan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisas	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	B	88,96
2	Nilai SAKIP	65,05	75	70	93,33
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100
4	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan	B	A-	A	100
5	Rasio Kemandirian Daerah	25,27	30	25,43	84,77

Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah sebuah upaya yang diambil guna memperbaharui dan merubah secara mendasar sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan pada tiga aspek utama, yaitu aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Dari ketiga aspek tersebut ditetapkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja aparatur. Hasil pengukuran pelaksanaan perubahan kedelapan area tersebut menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kemajuan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari perbaikan dan peningkatan kualitas 8 (delapan) area perubahan diatas. Dibandingkan dengan tahun 2017, capaian Reformasi Birokrasi Kota Mataram tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan diseluruh aspek penilaian, baik pada komponen pengungkit maupun pada komponen hasil. Adapun yang perlu ditingkatkan adalah penataan peraturan perundang-undangan pada komponen pengungkit dan nilai kapasitas organisasi pada komponen hasil.

Selain nilai Indeks Reformasi Birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menjadi indikator tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik. Pengelolaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Mataram berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya capaian nilai sakip tahun 2019 sebesar 65,05, meningkat 1,01 poin dari capaian tahun 2018 sebesar 64,04. Adapun capaian nilai sakip tahun 2020 diproyeksikan sebesar 70. Capaian tersebut belum mampu memenuhi target capaian angka 75. Namun demikian,

Pemerintah Kota Mataram tetap melakukan berbagai upaya perbaikan Sakip yaitu melakukan sinkronisasi tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran daerah; program dan kegiatan yang disusun dalam cascading disesuaikan dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan membangun dan menerapkan aplikasi e-sakip yang terintegrasi dengan *e-planning* dan *e-budgeting*.

Selain itu, telah dilakukan review RPJMD Kota Mataram 2016-2021. Dilakukan pula coaching clinic penyusunan SAKIP di Kementrian PAN-RB dengan melibatkan seluruh kepala SKPD dan unsur perencana. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut cukup mendukung perbaikan cascading sehingga menjadi lebih selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, perbaikan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja organisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Perbaikan tersebut dimulai dengan penetapan indikator keberhasilan yang lebih terukur dan dapat mencerminkan keberhasilan kinerja melalui penyederhanaan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi pengawasan akan berjalan dengan lebih baik setelah penyederhanaan indikator. Dengan demikian, proses penganggaran hingga evaluasi kinerja sudah mengarah kepada pencapaian tujuan yang berarti mengedepankan pada efisiensi anggaran yang ada serta efisiensi kegiatan demi mewujudkan prioritas daerah.

Indikator selanjutnya adalah Opini BPK. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Mataram kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, mempertahankan untuk ketujuh kalinya. Hal ini melandasi Kota Mataram mendapatkan Penghargaan Pencapaian Opini Tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari BPK dan Plakat Mitra Kerja Terbaik II LKPD 2019 dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB

Indikator terakhir untuk mengukur keberhasilan sasaran tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik adalah nilai unit pelayanan publik Kemenpanrb. Setiap tahun Kemenpanrb melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi ini bertujuan

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengambil sampel 3 (tiga) perangkat daerah yaitu DPMPTSP; RSUD Tipe B; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, Kota Mataram memperoleh nilai rata-rata 3,52 dan termasuk dalam kategori B. Kategori ini menunjukkan tingkat pelayanan publik di Kota Mataram cukup baik, namun perlu ditingkatkan. Beberapa rekomendasi yang diberikan KemenPANRB dan harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Melaksanakan review terhadap standar pelayanan secara berkala.
2. Memperluas publikasi standar pelayanan melalui website dan media informasi lainnya.
3. Memperluar publikasi maklumat pelayanan melalui media sosial.
4. Membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat.
5. Meningkatkan professional managemen front office.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
7. Memperluas publikasi SIPP non elektronik kepada stakeholder terkait.
8. Membuat rekap dan klasifikasi konsultasi dan pengaduan untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan.
9. Terus melakukan inovasi dan pengembangan inovasi yang telah ada.

2. Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah

Pengukuran pencapaian sasaran strategis di atas menggunakan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kemandirian Daerah	25,27	30	25,43	84,77

Rasio kemandirian fiskal daerah dipandang penting karena mengindikasikan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir tingkat kemandirian fiskal daerah mengalami fluktuasi; dari 25,80% pada tahun 2017menurun menjadi 24,67% pada tahun 2018, meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 25,27%, dan terakhir pada tahun 2020 mencapai 25,43%.

Namun demikian, tingkat kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah masih terbilang kecil, masih bersumber dari dana pemerintah pusat.

Peningkatan kemampuan fiskal daerah dilaksanakan dengan berbagai program/kegiatan yaitu:

1. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan Kegiatan :
   - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah;
   - Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
   - Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
   - Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
2. Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data dengan Kegiatan:
   - Pendataan Objek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
   - Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
   - Penyelenggaraan, Pengolahan dan Dokumentasi Data Pajak Daerah.
3. Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah dengan kegiatan :
   - Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak/Retribusi Daerah;
   - Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak / Retribusi Daerah;
   - Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah;
   - Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
   - Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Realisasi PAD.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar dengan kegiatan :
   - Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar;
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar;
   - Peningkatan Pengelolaan Pasar
6. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran dengan kegiatan :
   - Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran;
   - Pembinaan, Sosialisasi dan Edukasi Pelayanan Perparkiran;
   - Pembinaan, Sosialisasi dan Edukasi Pelayanan Perparkiran;
   - Penyediaan Kelengkapan Administrasi dan Operasional Pelayanan Perparkiran.

C. *REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020*

Jumlah APBD Kota Mataram 2020 : Rp. 1.463.299.094.563,54

Jumlah Realisasi APBD Kota Mataram 2020: Rp. 1.456.351.203.197,18

Persentase Realisasi APBD 2020: 99,25%

Peta anggaran berdasarkan anggaran yang mendukung sasaran strategis serta pemenuhan kebutuhan tetap, ditampilkan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program dan Kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian seluruh Sasaran Strategis	769.651.498.095	732.437.236.206	94,49
Belanja Gaji dan Tunjangan	432.933.878.309,59	409.092.057.986	94,49
Belanja Hibah yang menyasar pada beberapa sasaran strategis	101.062.839.355	101.062.839.355	100
Belanja Bantuan Sosial yang menyasar penanganan Angka Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Kerja, Serta mendukung Indeks Kota Toleran	13.603.210.000	11.676.200.000	85,83
Belanja Tidak Terduga mendukung Penanganan Bencana dan Sosial	140.000.000.000	133.875.525.346	95,63

Anggaran Program dan Kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian masing-masing Sasaran Strategis secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Jumlah SKPD	Jumlah Prog-Ram	Jmlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Reali-sasi
MISI 1: *Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai*							
TUJUAN: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal							
1	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan yang kondusif	3	8	19	3.680.448.000	3.165.750.000	86,02
2	Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana	3	6	13	1.656.828.400	1.471.779.750	85,81
MISI 2 : *Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEKdalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing*							

No	Sasaran Strategis	Jumlah SKPD	Jumlah Prog-Ram	Jmlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Reali-sasi
TUJUAN: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat							
3	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	2	12	67	76.885.526.284	36.390.992.112	47,33
4	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	2	20	64	279.667.638.877	257.301.121.039	92,00
5	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	10	21	48	5.790.182.698	5.203.289.050	89,86
MISI 3 : *Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BerbasisPotensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera*							
TUJUAN: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal							
6	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	5	11	95	14.721.766.528	12.119.136.912	82,32
7	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelnjutan	6	17	46	14.223.819.933	13.043.358.404	91,70
8	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	1	5	10	955.747.950	950.175.575	99,42
MISI 4 : *Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan*							
TUJUAN: Meningkatnya infrastruktur publik, serta penunjang ekonomi dan sosial yang berkualitas							
9	Tersedianya sarana dan prasarana publik serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	4	24	74	117.356.558.936	109.520.748.313	93,32
MISI 5 :							

No	Sasaran Strategis	Jumlah SKPD	Jumlah Prog-Ram	Jmlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Reali-sasi
Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)							
TUJUAN: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel							
10	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	28	114	331	165.529.046.501	145.892.870.296	88,14
11	Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	3	8	21	23.487.105.680	13.277.813.524	56,53

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun2020 menggambarkan realisasi kinerja Pemerintah Kota Mataram tahunan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil analisis capaian 6 indikator dalam menjawab 5 tujuan dan 27 indikator dalam menjawab 11 sasaran strategis Kota Mataram Tahun 2020, pencapaian kinerja PemerintahKota Mataram Tahun 2020 sebesar **83,26 persen** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja ***tinggi***. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Terdapat beberapa rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka mengefektifkan penerapan budaya kinerja yang tertuang dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 31 Maret Tahun 2020 Nomor: B/373/AA.05/2021 Hal : Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yaitu:

1. Menindaklanjuti perbaikan tujuan, sasaran dan indicator kinerja yang telah disusun, sehingga mempunyai legalitas dan dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan, penganggaran dan penyelarasan dokumen perencanaan tingkat Kota dan tingkat Perangkat Daerah;
2. Menyempurnakan penjabaran kinerja (*cascade down*) yang berdasarkan pada kerangka logis kinerja. Dengan demikian *cascade* kinerja dapat lebih menggambarkan proses bisnis terwujudanya kinerja utama yang akan dicapai;
3. Karena telah memasuki masa akhir RPJMD 2016-2021, perlu memperhatikan pencapaian target kinerja jangka menengah level Kota dan Perangkat Daerah. Selain itu dalam masa transisi menuju RPJMD baru perlu memperhatikan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada, serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja, seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*), serta mekanisme *cascade* kinerja;

4. Menyempurnakan kualitas evaluasi program prioritas daerah yang relevan dengan isu strategis daerah, utamanya dalam rangka percepatan pemulihan kesehatan dan perbaikan ekonomi saat pandemic dengan memperhatikan kolaborasi antar program yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah;
5. Mendorong penerapan budaya kerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. Penguatan budaya kerja diharapkan dilakukan dengan pelaksanaan reviu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja;
6. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian system perencanaan kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantau kinerja oleh pimpinan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal, agar hasil evaluasi yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan SAKIP yang lebih efektif. Perlu dilakukan pula pemantauan terhadap tindak lanjut saran atau rekomendasi guna mengetahui sejauh mana hasil evaluasi ditindak lanjuti untuk perbaikan;
8. Melakukan penyempurnaan system pengendalian internal diseluruh Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi resiko kemungkinan kegagalan target kinerja.

Terhadap rekomendasi tersebut, beberapa poin memang telah menjadi rencana perbaikan yang sudah maupun menjadi rencana kerja yang akan dilaksanakan yaitu:

Diawal tahun 2020, Walikota Mataram membuka kelas Coaching Clinic untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penerapan manajemen kinerja dan memanfaatkan sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan. Walikota Mataram hadir langsung dan didampingi oleh Sekda dan Seluruh Asisten dimana pesertanya adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan unsur perencana tanpa berwakil;

Tindaklanjut dari pelaksanaan Coaching Clinic tersebut, Cascading Perangkat Daerah disempurnakan serta digunakan sebagai alat dalam melaksanakan verifikasi Renja SKPD sebagai salah satu tahapan dalam Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2021 maupun Perubahan RKPD Tahun 2020 jika dimungkinkan guna memastikan alokasi anggaran dan sasaran OPD mengarah kepada sasaran strategis Kota Mataram;

Komitmen Bersama antara 3 (tiga) instansi yang terlibat langsung dalam SAKIP yaitu Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam keseluruhan tahapan dari proses perencanaan hingga pelaporan dibawah

koordinasi dari Sekretaris Daerah dan Asisten 3 Kota Mataram. Mekanisme kerjanya adalah unsur dalam instansi tersebut akan berada dalam satu tim kerja yang terlibat dalam penyusunan cascading OPD, penyempurnaan cascading RPJMD, penyusunan PK OPD, evaluasi capaian kinerja hingga penyusunan LKjIP Kota Mataram serta reviu LKjIP OPD;

Pengembangan aplikasi pengukuran kinerja dilaksanakn oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja dan kedepannya bisa digunakan dalam pemberian reward and punishment;

Dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram yang baru, seluruh rekomendasi menjadi perhatian agar arah pembangunan berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented government) terlebih ditengah kondisi pandemi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat akibat pembatasan sosial. Pelibatan sebanyak mungkin unsur Perangkat Daerah dalam penyusunan RPJMD menjadi strategi agar informasi dalam rangka penyusunan lebih lengkap sehingga rencana yang disusun diharapkan dapat lebih operasional menjawab realita di masyarakat. Disisi teknokratik, Tim penyusun didampingi oleh akademisi dari Universitas Mataram dan Universitas Gajahmada.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya tahun 2020 secara rata-rata dapat dipenuhi sesuai dengan harapan meskipun terdapat 3 indikator kinerja yang masih jauh dari target. Jika terdapat indikator sasaran yang tajam mengukur keberhasilan tujuan maupun sasaran strategis, kami akui semata-mata adalah kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT sehingga segala bentuk rekomendasi dan masukan menjadi bahan bagi kami untuk memotivasi dan menyempurnakan kinerja dikemudian hari.